

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) dalam menangani konflik sosial di wilayah Ring 1, khususnya di Desa Bitahan Baru, dapat disimpulkan bahwa perusahaan secara sadar memanfaatkan CSR sebagai instrumen strategis penyelesaian konflik sosial, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif atau aktivitas filantropi. CSR diposisikan sebagai bagian integral dari manajemen risiko sosial yang berlapis, terintegrasi, dan proaktif, dengan tujuan utama membangun serta menjaga Social License to Operate (SLO) perusahaan di tengah masyarakat terdampak.

Strategi CSR PT KPP menunjukkan pola pendekatan tiga lapis yang secara sistematis melibatkan interaksi antara aktor bisnis (perusahaan), aktor lokal desa, dan aktor pemerintah, sehingga konflik sosial tidak dipahami sebagai persoalan sepihak, melainkan sebagai persoalan relasional yang harus diselesaikan melalui kerja sama lintas aktor. Pada lapisan pertama, PT KPP menempatkan CSR sebagai sarana penguatan legitimasi dan kepercayaan sosial melalui penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang berbasis pada data historis keluhan masyarakat, potensi protes, dan dinamika sosial desa. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mendeteksi gejala konflik sejak dini dan melakukan intervensi sebelum konflik berkembang menjadi terbuka, sehingga konflik sosial dapat diselesaikan bahkan sebelum termanifestasi secara nyata di ruang publik.

Lapisan kedua difokuskan pada mitigasi konflik ekonomi, yang terbukti menjadi pemicu konflik paling dominan di Desa Bitahan Baru. Dalam konteks ini, CSR digunakan sebagai katup pengaman sosial (safety valve) untuk meredam tekanan akibat keterbatasan lapangan kerja di sektor tambang. PT KPP tidak hanya merespons tuntutan kerja dengan penolakan administratif, tetapi mengalihkannya ke strategi win-win solution melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap UMKM lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan

CSR untuk mengelola ekspektasi masyarakat secara konstruktif, sekaligus menciptakan nilai ekonomi tambah (added value) yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Lapisan ketiga diarahkan pada jaminan keberlanjutan hubungan jangka panjang, yang diwujudkan melalui pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif dan kolaboratif. PT KPP secara aktif melibatkan masyarakat desa melalui mekanisme forum diskusi kelompok (FGD) berbasis bottom-up, membangun kolaborasi tri-sektor antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, serta mengakui peran strategis elite lokal, khususnya Kepala Desa, sebagai mediator konflik dan penghubung kepentingan. Keterlibatan aktor desa dan pemerintah ini memperkuat legitimasi sosial dan politik informal perusahaan, sekaligus memastikan bahwa CSR tidak berjalan secara eksklusif, melainkan menjadi ruang negosiasi kepentingan yang terbuka dan partisipatif.

Keberhasilan strategi CSR PT KPP juga ditentukan oleh dua faktor kunci, yaitu kecepatan respons dan sense of ownership masyarakat. Kecepatan respons yang ditopang oleh sistem peringatan dini memungkinkan perusahaan menanggapi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan harkat dan martabat masyarakat secara cepat dan tepat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan program CSR menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership), sehingga potensi konflik dapat dicegah bahkan sebelum program dijalankan. Dengan demikian, konflik tidak lagi diselesaikan melalui pendekatan koersif atau kompensatif semata, melainkan melalui integrasi kepentingan dan partisipasi sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR PT KPP telah mengalami transformasi signifikan, dari kegiatan filantropis yang bersifat reaktif menjadi strategi pembangunan sosial berbasis partisipasi dan manajemen konflik. CSR dimanfaatkan sebagai alat untuk menjembatani kepentingan perusahaan, masyarakat desa, dan pemerintah, sehingga konflik sosial dapat dikelola secara konstruktif dan berkelanjutan. Pengakuan masyarakat lokal terhadap PT KPP sebagai perusahaan yang menjadi rujukan (role model) bagi perusahaan lain di wilayah tersebut menunjukkan bahwa strategi CSR yang kolaboratif dan berorientasi pada penyelesaian konflik sosial

mampu memperkuat legitimasi perusahaan sekaligus menjaga stabilitas operasional jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran baik secara akademis maupun praktis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait, yaitu:

5.2.1 Saran Praktis

- a. Untuk PT Kalimantan Prima Persada (KPP)
 1. Formalisasi EWS dan Standard Operating Procedure (SOP) Respons. PT KPP disarankan untuk memformalkan EWS menjadi dokumen SOP yang mengikat seluruh unit operasional, memastikan adanya batas waktu respons maksimal (misalnya, 24 jam) untuk setiap tingkat keluhan yang terdeteksi.
 2. Peningkatan Formalisasi Kolaborasi Tri-Sektor. Kolaborasi dengan pihak ketiga, terutama untuk program added value (seperti agrowisata), disarankan untuk diperkuat melalui MoU yang mengikat secara hukum dan jangka panjang, bukan hanya kemitraan proyek. Ini bertujuan untuk memastikan program tidak terhenti jika terjadi pergantian personel di internal KPP.
- b. Untuk Pemerintah Desa Bitahan Baru dan Pemerintah Daerah
 1. Formalisasi Indikator Kinerja Kemitraan (IKK) Desa: Pemerintah Desa disarankan untuk menyusun Indikator Kinerja Kemitraan (IKK) yang memformalkan "kredit poin" Kepala Desa. IKK ini dapat dijadikan dasar akuntabilitas publik dan penilaian keberhasilan kemitraan dengan perusahaan, sehingga legitimasi elit lokal tidak hanya didasarkan pada trust informal.
 2. Peningkatan Pengawasan Dampak Lingkungan: Mengingat kritik dari WALHI mengenai dimensi Planet, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan fungsi pengawasan independen terhadap dampak lingkungan operasional tambang. Hal ini penting untuk melengkapi strategi CSR PT KPP di dimensi People (masyarakat) dengan jaminan perlindungan lingkungan yang kuat dan akuntabel..

5.2.2 Saran Teoritis

a. Pengembangan Model Komparatif EWS

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan membandingkan efektivitas EWS yang diterapkan PT KPP (berbasis indikator historis) dengan perusahaan di sektor ekstraktif lain yang menggunakan teknologi big data atau social media monitoring. Hal ini penting untuk mengidentifikasi model EWS yang paling akurat dan efisien di lingkungan tambang.

b. Analisis Dampak Jangka Panjang Program Pemberdayaan:

Penelitian berikutnya perlu fokus pada analisis keberlanjutan program win-win solution (UMKM dan pelatihan) dalam jangka waktu 5–10 tahun untuk mengukur secara kuantitatif sejauh mana program tersebut benar-benar mengurangi tingkat pengangguran struktural dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang.